

Ringkasan Forum Riset dan Bisnis #2

“Usaha versus Situasi Politik”

Situasi politik bisa berdampak secara langsung maupun tak langsung pada dunia usaha. Perubahan kebijakan yang terjadi dari sebuah politik pemerintahan bisa jadi mendukung atau merugikan suatu usaha. Risiko yang ditimbulkan dari dampak politik kepada dunia usaha perlu diketahui sejak dini, agar keduanya bisa berjalan seiring dan mampu memberikan manfaat. Stabilitas pemerintahan juga perlu dicermati dalam bisnis karena perubahan politik yang mendadak dapat menimbulkan risiko dalam bisnis, juga berpotensi menjadi penghambat investasi. Hambatan paling tinggi dalam hubungan usaha dan politik adalah ketika kebijakan pemerintah tidak konsisten, yang berubah-ubah kemudian mengganggu kegiatan usaha. Mengetahui data dan informasi terbaru yang berhubungan dengan situasi politik dan kebijakan pemerintah menjadi hal penting bagi sektor swasta agar dapat mengantisipasi pengaruhnya ke dalam usaha yang mereka jalankan. Hal ini menjadi topik penting yang didiskusikan dalam Forum Riset dan Bisnis ke-dua (FRB#2) yang diselenggarakan CCPHI bersama Knowledge Sector Initiative (KSI) pada hari Rabu, 22 November 2017 di kantor KSI, Gedung Perkantoran Ratu Plaza Jakarta.

Knowledge Sector Initiative (KSI) adalah suatu program di bawah Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia yang sudah berlangsung sejak tahun 2013. Fase I berlangsung dari tahun 2013-2017 dan saat ini KSI memasuki fase II mulai Maret 2018-2022. Di fase II, KSI bermaksud untuk lebih mendekatkan lembaga-lembaga penelitian dengan sektor swasta dengan membangun platform yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas riset dan bagaimana hubungannya dengan kebijakan pemerintah, serta pendanaan riset. Dalam fase ini, KSI ingin mempertemukan para mitra KSI yang sebagian besar lembaga penelitian independen dengan sektor swasta dan juga pemerintah melalui Forum Riset dan Bisnis yang diselenggarakan bekerja sama dengan CCPHI. Forum Riset dan Bisnis ini menghadirkan sektor swasta yang terdiri dari perusahaan-perusahaan swasta serta lembaga konsultan, lembaga-lembaga penelitian yang menghasilkan riset terkait kebijakan pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM yang melakukan advokasi.



Para pembicara dari PRI dan DIPI. ©CCPHI, 2017.

“Selama ini hubungan yang dibangun dengan pihak eksternal perusahaan untuk kepentingan merespon satu regulasi lebih banyak didasari dengan melihat adanya kemungkinan jika regulasi tersebut berpotensi kontraproduktif dengan apa yang dilakukan industri atau sektor swasta”.
Deni Puspahadi, Indofood .

Menanggapi hubungan usaha dengan kebijakan yang dihasilkan pemerintah, dari perspektif swasta, Deni Puspahadi dari Indofood mengungkapkan bahwa, “Selama ini hubungan yang dibangun dengan pihak eksternal perusahaan untuk kepentingan merespon satu regulasi lebih banyak didasari dengan melihat adanya kemungkinan jika regulasi tersebut berpotensi kontraproduktif dengan apa yang dilakukan industri atau sektor swasta”. Hal ini disepakati oleh Asep Suharyadi dari lembaga penelitian Smeru yang melihat bahwa secara aktif perusahaan mau melakukan advokasi kebijakan kepada pemerintah sebagai bahan lobi. Ia melihat bahwa biasanya perusahaan juga selalu melakukan pemetaan terhadap isu-isu kebijakan. “Ada beberapa perusahaan datang ke Smeru

untuk berdiskusi mengenai isu-isu kebijakan. Misalnya satu perusahaan multinasional yang sangat *labour intensive* datang untuk mendiskusikan isu-isu ketenagakerjaan, kira-kira kemana arah kebijakan pemerintah, apakah akan semakin mempersulit *labour intensive industries* atau akan makin mempermudah. Karena bagi mereka jika kebijakannya mempersulit, mereka sudah menargetkan negara lain untuk pindah (*footloose*)."

Dalam hal kebijakan pemerintah, ketika melihat arah kebijakan memiliki potensi ke arah yang tidak sejalan dengan keberhasilan usaha, maka sektor swasta melakukan upaya untuk bergerak bersama-sama di antara perusahaan yang memiliki kesamaan kepentingan untuk menolak Rancangan Undang-Undang (RUU). Contohnya, PT Freeport Indonesia/PTFI sebuah perusahaan pertambangan, yang bersama perusahaan-perusahaan lainnya sedang dalam upaya menolak suatu RUU. Sektor swasta melihat bahwa dalam suatu industri jika sebuah perusahaan melakukan sesuatu untuk menyuarakan pendapat sendirian akan mengalami kesulitan untuk didengar oleh pemerintah. Akan lebih mudah jika perusahaan-perusahaan ber-gabung pada asosiasinya atau memiliki forum khusus, dengan demikian suara mereka akan lebih kuat dan didengar pemerintah.

Dalam menyuarakan pendapat kepada pemerintah, sektor swasta melakukan upaya dengan mengikat pada suatu lembaga (bisa berupa lembaga riset, universitas atau LSM) untuk melakukan riset terhadap kebijakan. Hal ini dimaksudkan agar hasil riset dapat dijadikan dasar memberikan masukan dalam melakukan advokasi kepada pemerintah agar bersedia melihat dampak sisi bisnis yang dihasilkan dengan sudut pandang yang lebih netral dari sisi *scientific*.

Akses sektor swasta kepada data dan informasi yang berkaitan kebijakan pemerintah

Berbagai riset dilakukan perusahaan swasta untuk mendukung bisnis serta menyelaraskan dengan kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan bisnis mereka. Perusahaan pertambangan seperti PTFI misalnya, banyak melakukan riset tentang keanekaragaman hayati dan sosial. Kerja sama PTFI dalam riset biasanya dilakukan dengan universitas seperti: UNIPA, IPB, UI, dan juga bersama lembaga lainnya seperti: LIPI dan USAID.

Ada pula kepentingan riset yang dilakukan perusahaan saat memasuki wilayah operasi bisnis yang baru. Misalnya PTT Exploration and Production /PTTEP sebuah perusahaan minyak dan gas nasional di Thailand yang beroperasi di Indonesia. Kerja sama riset dilakukan PTTEP dengan LSM nasional dan LSM lokal, saat memasuki satu wilayah bisnis yang baru atau saat melakukan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Selain riset berupa *baseline assessment*, hal yang dilakukan dalam rangka riset adalah berdiskusi dengan pemerintah setempat. Agar dapat melakukan diskusi dengan pemerintah, PTTEP menggandeng LSM. Tujuan berdiskusi dengan pemerintah adalah agar PTTEP



Para Peserta FRB#2 dari sektor swasta, PRI dan LSM. ©CCPHI, 2017.

bisa mendapatkan informasi kebutuhan pelatihan dan sosial: pendidikan, kesehatan, atau *community empowerment* di daerah operasi bisnis yang akan dimasukinya.

Selain dari sektor pengetahuan dengan melakukan kerja sama riset, sektor swasta juga memanfaatkan data dan informasi yang bersumber dari media. Di Litbang Kompas misalnya, produk-produk hasil riset disebarluaskan melalui Koran Kompas dan diviralkan oleh beberapa mitra yaitu: Kompas TV, dan yang terbaru kompas.id, dan juga beberapa artikel di kompas.com, sehingga dengan mudah sektor swasta dapat mengaksesnya. Selain produk yang ditayangkan di media massa, Litbang Kompas juga membuat riset pada tahun 2015 tentang indeks kota cerdas, dan tahun 2016 membuat indeks pariwisata, kerja sama dengan Kementerian Pariwisata. Sektor swasta yang menjadi *subscriber* di The Jakarta Post, juga bisa mendapatkan informasi tentang situasi politik dan ekonomi. Dalam kurun waktu setiap dua minggu, para peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang bekerja sama dengan The Jakarta Post menuliskan analisis hasil riset politik dan ekonomi yang dipertimbangkan penting untuk diketahui oleh *subscriber* di Jakarta Post yang berasal dari sektor swasta.

Selain mendapatkan data dan informasi melalui riset berkaitan kebijakan, upaya sektor swasta untuk mengakses kebijakan pemerintah bisa juga didapatkan melalui pelatihan. Karena badan usaha terikat oleh peraturan perundang-undangan, maka penting bagi sektor swasta untuk mengetahui bagaimana proses perancangannya. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), adalah lembaga yang menawarkan bentuk kerja sama dengan sektor swasta berupa pelatihan perancangan perundang-undangan. Produk pelatihan ini sebelumnya diberikan PSHK kepada pemerintah dan para anggota DPR. Dengan mencermati bahwa perancangan perundang-undangan juga perlu dipahami oleh pihak swasta, maka materi pelatihan tersebut kemudian mampu dikemas menjadi produk pelatihan yang ditawarkan PSHK kepada pihak swasta, sehingga pihak swasta bisa merasakan manfaatnya bagi bisnis mereka.

Produk-produk hasil penelitian berkaitan situasi politik

yang mempengaruhi usaha sebenarnya bisa didapat juga di berbagai lembaga penelitian dan siap digunakan oleh sektor swasta. Misalnya, hasil penelitian PUSAD Paramadina tentang stabilitas keamanan dalam konteks kebebasan beragama yang menurutnya akan berdampak baik jika dimanfaatkan oleh sektor bisnis karena sektor swasta memiliki sumber daya dan insentif terhadap kebebasan beragama. Selain lembaga penelitian, ada pula Young on Top yang merupakan komunitas dan memiliki *youth forum* setiap tahun untuk sekitar 4.000 mahasiswa yang bersifat akademis. Banyak sekali peneliti muda yang berbicara di Forum ini, yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja sama dengan sektor swasta.

Akses sektor swasta kepada data dan informasi yang berkaitan kebijakan pemerintah, sebenarnya tersedia di cukup banyak jalur, baik melalui sektor pengetahuan (lembaga penelitian, LSM, maupun universitas) maupun media. CCPHI melihat bahwa forum-forum seperti FRB memang sudah banyak dilakukan dan terbukti memang bisa meningkatkan *awareness* dan terjadi dialog di antara sektor swasta dengan sektor pengetahuan. Setelah dialog

diharapkan dapat tercipta *trust building*. Dari *trust building* kemudian ada hubungan-hubungan kemitraan yang lebih serius antara sektor swasta dan sektor pengetahuan.

Dalam penutup kegiatan FRB ini, KSI pula mempertimbangkan pentingnya peningkatan keterampilan komunikasi dari para pihak di sektor pengetahuan, agar akses kepada sektor swasta menjadi lebih terbuka. Hal ini mengingat tantangan di era digital ini adalah bagaimana edukasi yang bersifat data dan informasi berkaitan kebijakan disampaikan dalam bahasa yang populer sehingga sektor swasta bisa tertarik. Usulan ditujukan dengan mempertemukan para *scientist* atau peneliti dengan para pihak yang *concern* di dunia komunikasi. "Komunikasi yang sifatnya *scientific* penting, tapi tidak kalah penting juga komunikasi yang sifatnya praktis dan populer, agar edukasi tersampaikan dengan berbicara *based on data* dan terstruktur", pungkas Rival Ahmad dari KSI. Kesemua hal ini adalah upaya untuk menjembatani sektor penelitian dengan sektor swasta agar menjadi lebih dekat dan saling memberikan manfaat, sekaligus mendukung ke arah kebijakan yang lebih baik.

PROFIL POLICY RESEARCH INSTITUTE (PRI) DAN DIPI

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)

PSHK dibentuk tahun 1998 tepatnya 1 Juli 1998 sehingga sudah berjalan selama 19 tahun. PSHK adalah lembaga riset dan advokasi di bidang hukum yang fokus kepada bidang legislasi dan peradilan. Keinginan PSHK adalah mendorong reformasi hukum di Indonesia. PSHK mengembangkan organisasi dengan riset. Salah satu riset yang dilakukan PSHK adalah riset mengenai penyimpangan keputusan Presiden dan riset ini berkembang, yang mendorong munculnya riset lain di bidang legislasi dan peradilan. Beberapa kegiatan yang dilakukan selain riset adalah mengembangkan training Perancangan Peraturan Perundang-undangan atau biasa disebut *Legislative Drafting Training* (LDT) sejak tahun 2005. PSHK juga membantu pelatihan perancangan tersebut kepada anggota-anggota DPR. Dari *legislative drafting training* PSHK juga mengembangkan pelatihan ke perancang pemerintah, peneliti DPR, termasuk di institusi daerah.

PSHK kemudian mengemas paket pelatihan yang biasa dilakukan kepada pemerintah, untuk diberikan ke sektor swasta, dengan didasari keyakinan bahwa dalam hal peraturan selalu akan mengikat semua sektor, termasuk sektor swasta. Pihak swasta dimungkinkan memiliki kebutuhan untuk memahami peraturan dan sebagainya. Mulai tahun 2009 PSHK memulai sistem LDT kepada peserta dari organisasi internasional dan sektor swasta. Selain itu, tahun 2000, PSHK mendirikan hukumonline.com, sebuah situs hukum yang saat ini bentuknya sudah PT. PSHK juga membuat jurnal hukum dan membuat perpustakaan hukum. Tahun 2011, PSHK juga mendirikan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera yang mendidik para sarjana hukum. Selama proses pendirian Jentera dari tahun 2011-2014, PSHK juga mengem-

bankan beberapa model pelatihan berdasarkan pengetahuan hukum yang dimiliki dan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh *founders*. Ada pelatihan perpajakan, Bahasa Inggris, dan pelatihan di bidang hukum ekonomi untuk *in-house*, yang juga dikembangkan dan ditawarkan ke sektor swasta.

Pengalaman PSHK dalam bekerja sama dengan pihak swasta: pada tahun 2011, PSHK menjalankan kegiatan training di Astra bernama *Legal Officer Development Programme* yaitu program training selama 40 hari untuk *legal officer* di perusahaan-perusahaan di bawah Astra (*in-house training*). Secara keseluruhan PSHK terbuka dalam kemitraan dengan pihak swasta melalui:

1. Memberi pelatihan sesuai pengetahuan yang dimiliki PSHK, dengan mempertimbangkan bahwa pelatihan tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan kebijakan bagi sektor swasta.
2. Mendorong *law firm* untuk berpartisipasi dalam reformasi hukum. Dengan kerja sama yang dilakukan bersama *law firm*, PSHK melakukan kajian untuk mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor perijinan.
3. Menawarkan kesempatan bermitra dengan pihak swasta melalui Sekolah Hukum Jentera. PSHK membutuhkan sumber daya yang besar sehingga terbuka untuk bekerja sama dengan pihak swasta, *law firm*, beberapa perusahaan, untuk melakukan pembiayaan dengan memberikan beasiswa bagi mahasiswa Jentera.

Center for Strategic and International Studies (CSIS)

CSIS berdiri sejak tahun 1971, didirikan oleh aktivis mahasiswa tahun 1966 yang pada saat itu demo untuk melengserkan Presiden Soekarno. Setelah waktu berjalan dan Soeharto lengser, pada tahun 1998 pendekatan CSIS mulai berubah yaitu kepada bidang ekonomi sehingga dibentuklah departemen ekonomi di CSIS. Ke depan, CSIS direncanakan akan dipecah menjadi tiga departemen, yaitu: Departemen Politik, Departemen Hubungan Internasional (HI) dan Departemen Ekonomi.

Fokus CSIS lebih banyak ke studi yang sifatnya non-partisan (tidak memihak). Sumber dana CSIS berasal dari *non-profit organization*, pemerintah Indonesia, pemerintah luar negeri dan lembaga donor asing. Artinya bukan berasal dari sektor swasta atau bisnis. Ketika muncul beberapa peluang untuk mendapat tawaran dari pihak swasta, CSIS menyadari memiliki sedikit sekali pengalaman dalam *dealing with business communities*, sehingga muncul ide untuk membentuk sebuah *consulting firm* untuk bisa bekerja sama dengan pihak swasta. Dalam upaya mewujudkannya, CSIS bekerja sama dengan Sekolah Bisnis Prasetiya Mulya dan The Jakarta Post (keduanya berada di bawah satu kepemilikan dengan CSIS) membentuk sebuah *consulting firm* pada tahun 2017, berkantor di The Jakarta Post. Melalui *consulting firm* ini, CSIS sejak saat itu bisa menerima menerima tawaran kerja sama dengan swasta. Beberapa kegiatan di CSIS yang berkaitan dengan pihak swasta adalah:

1. Kegiatan *update* dwi mingguan soal kondisi politik dan ekonomi di Indonesia, dengan penyebaran informasi kepada *subscribers* yang umumnya adalah pihak swasta. Secara teknis, dalam kurun waktu setiap dua minggu, para peneliti CSIS menuliskan kejadian menarik dan yang dipertim-

bangkan menjadi kepentingan umum untuk diketahui oleh sektor bisnis. CSIS meneliti, menganalisa, menuliskan dan mengirimkannya ke The Jakarta Post, untuk dikirimkan kepada *subscribers*nya.

2. Riset tentang UMKM di Indonesia. Beberapa kali CSIS mengundang *stakeholders* UMKM termasuk perusahaan seperti Indofood untuk berdialog dan mengetahui apa yang dibutuhkan dari UMKM di Indonesia. CSIS kemudian mengumpulkan data-data soal UMKM, karena ternyata pemerintah sendiri tidak mempunyai *database* yang cukup tentang hal UMKM.
3. Riset tentang Facebook. Facebook Asia meminta CSIS mengamati penetrasi internet di Indonesia bagian timur. Riset ini didasari data bahwa Indonesia termasuk yang paling banyak pengguna internetnya khususnya pengguna Facebook, tetapi hanya terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara di daerah Indonesia timur sangat kecil sekali aksesnya.
4. Survei CEO, sebuah survei untuk mengetahui apa saja hambatan bisnis yang dihadapi selama melakukan bisnis di Indonesia. Survei ini dilakukan dengan mendatangi langsung 150 CEO. Prosesnya membuat janji wawancara dengan mempersiapkan instrumen kuesioner dari teman-teman peneliti.
5. *Big data analytics* tentang pengguna Gojek. Pengumpulan *database* soal perilaku pengguna Gojek yang dikaitkan dengan kepentingan bisnis.

Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia/DIPI

DIPI merupakan lembaga yang masih sangat baru (diluncurkan Maret 2016). DIPI menyediakan *link* antara lembaga riset dan sektor bisnis, dimana hal tersebut adalah sesuatu yang masih kurang di Indonesia. Setelah Orde Baru mengambil alih pemerintahan, dibentuklah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Setelah Habibie kembali ke Indonesia dan mendirikan Kemenristek, dikeluarkan UU no. 8 tahun 1990 yang melahirkan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI). Kelahiran AIPI diprakarsai oleh tokoh-tokoh besar seperti Prof. Habibie, Prof. Samiun Samadikun, dan Fuad Hasan. Dari AIPI, masukan-masukan yang berbasis riset mulai bermunculan. AIPI kemudian berperan seperti DPA (Dewan Pertimbangan Agung) yang pada masanya dahulu mendasarkan riset-riset internal mereka untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Apapun kebijakannya, harus berdasarkan *evidence-* dan *scientific-based*.

DIPI lahir sebagai lembaga mandiri yang bernaung di bawah AIPI. Alasan dibentuknya DIPI salah satunya karena kondisi riset di Indonesia yang masih sangat rendah, khususnya riset yang fundamental (berbeda dengan riset aplikatif cenderung sudah lebih banyak). Untuk riset fundamental hanya sekitar 0.1% dari GDP Indonesia, jadi masih sangat kurang. Kondisi Indonesia ini terting-

gal jauh dengan Korea Selatan yang sesama negara Asia, dimana peneliti di Korea Selatan sangat didorong untuk melakukan riset fundamental. Mandat kepada DIPI selanjutnya adalah mencoba menjembatani agar para periset atau para *scientist* tetap bertahan dengan integritasnya dan di sisi lain DIPI harus memfasilitasi swasta dan lembaga donor untuk memenuhi kepentingannya. DIPI sempat melakukan *joint call* untuk proposal riset dengan beberapa negara dan menerima proposal riset dari seluruh Indonesia dan beberapa dari luar. Ada beberapa riset yang kemudian terpilih. DIPI ingin menunjukkan bahwa Indonesia mampu melakukan *world class selection of proposal*. Dalam proses *peer review* proposal, DIPI pernah melibatkan hampir 26 negara, dan tidak dibayar. Meskipun tidak dibayar, DIPI memastikan bahwa proposal yang masuk merupakan standar *world class*. Berkaitan dengan hal tersebut DIPI pula melakukan *DIPI Call* (yang dimaksud adalah *Call For Papers* kepada para peneliti) khusus untuk nasional dengan pedoman yang DIPI miliki seperti "SAINS45". "SAINS45" adalah agenda ilmu pengetahuan Indonesia menyongsong satu abad kemerdekaan. Idenya adalah mengacu pada gambaran seperti apa Indonesia merdeka setelah 100 tahun yaitu di tahun 2045 nanti.

Dokumen ini merupakan bagian dari rangkaian Knowledge Stories yang didasarkan pada paparan oleh para mitra pada Pertemuan Forum Riset & Bisnis ke-2 pada bulan November 2017 yang diadakan oleh CCPHI, suatu proyek yang didanai oleh Ford Foundation. Ditulis oleh Anita Kastubi (CCPHI – Communication Officer); email: anita.kastubi@ccphi.org; atau kunjungi kami di www.ccphi.org.